



Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Islam dan Katolik : Analisis Kepemimpinan Megawati dan Aquino

Nyi Ayu Khofifah^{1*}, M. Ikhsan Tanggok²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nyiayu1412@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the concept of women's leadership from an Islamic and Catholic perspective and how religious values influence the acceptance and legitimacy of women's leadership in the public sphere. Using a qualitative approach using a desk study method, this study analyzes religious texts, scientific literature, and case studies of the leadership of two Southeast Asian women: Megawati Soekarnoputri in Indonesia and Corazon Aquino in the Philippines. The results show that both Islam and Catholicism have complex histories and interpretations of women's roles in leadership. While conservative and patriarchal readings exist within both traditions, there is also interpretive space that allows women to emerge as leaders. The leadership of Megawati and Aquino demonstrates that women are capable of leading with distinctive styles rooted in values of spirituality, morality, and service. Both demonstrate a non-confrontational yet effective leadership approach, which simultaneously opens up space for reinterpreting women's roles in religion and politics. Thus, women's leadership is not a deviation from religious teachings, but rather part of the socio-religious dynamic that demands inclusivity and equality.*

Keywords: Aquino; Catholicism; Megawati; Women's Leadership; Islam.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam dan Katolik serta bagaimana nilai-nilai keagamaan memengaruhi penerimaan dan legitimasi kepemimpinan perempuan di ruang publik. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis teks-teks keagamaan, literatur ilmiah, serta studi kasus kepemimpinan dua tokoh perempuan Asia Tenggara, Megawati Soekarnoputri di Indonesia dan Corazon Aquino di Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Islam maupun Katolik memiliki sejarah dan tafsir yang kompleks terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan. Meskipun terdapat pembacaan yang konservatif dan patriarkal dalam kedua tradisi, terdapat pula ruang tafsir yang memungkinkan perempuan tampil sebagai pemimpin. Kepemimpinan Megawati dan Aquino menjadi bukti bahwa perempuan mampu memimpin dengan gaya khas yang berakar pada nilai spiritualitas, moralitas, dan pelayanan. Keduanya menampilkan pendekatan kepemimpinan yang tidak konfrontatif namun efektif, yang sekaligus membuka ruang reinterpretasi terhadap peran perempuan dalam agama dan politik. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran agama, melainkan bagian dari dinamika sosial keagamaan yang menuntut inklusivitas dan kesetaraan.

Kata kunci: Aquino; Islam; Katolik; Kepemimpinan Perempuan; Megawati.

1. LATAR BELAKANG

Gagasan tentang “kepemimpinan perempuan” sejatinya bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia. Sebagai setengah bagian dari masyarakat, perempuan memiliki kemampuan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik secara spiritual, fisik, intelektual, maupun moral. Namun, dalam konteks masyarakat modern, masih terdapat kesalahpahaman mengenai peran dan hak perempuan, yang pada akhirnya menjadi penghambat bagi perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Mufarikhin & Siti Malaiha Dewi, 2021). Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi. Keefektifan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam memengaruhi serta mengarahkan para anggotanya. Pemimpin berperan dalam membangkitkan

motivasi dan semangat kerja, menciptakan rasa aman, meningkatkan kualitas kehidupan kerja, serta menentukan tingkat pencapaian organisasi. Selain itu, pemimpin juga memiliki peran penting dalam membantu kelompok maupun individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, terutama kemampuan atau keunggulan dalam suatu bidang tertentu yang membuatnya mampu memengaruhi orang lain agar bersama-sama melakukan berbagai aktivitas guna mencapai satu atau beberapa tujuan (Gibson, James, L, 2005). Perempuan merupakan bagian penting dari tatanan masyarakat yang jumlahnya lebih besar dibandingkan laki-laki. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai ketentuan-Nya, dengan kedudukan, martabat, hak, dan kewajiban yang setara. Menurut Djasmoredjo, perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya hanya terletak pada aspek biologis. Namun, dalam konstruksi sosial, perempuan sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, mudah mengalah, kurang berdaya, tidak terlalu aktif, serta memiliki naluri pengasuhan. Sebaliknya, laki-laki lebih sering dipersepsikan sebagai figur yang kuat, dominan, energik, mandiri, dan agresif (Fitriani, A, 2015).

Perkembangan zaman telah membawa perubahan sosial yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal peran dan posisi perempuan di masyarakat. Di masa lalu, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang terbatas pada ranah domestik, sementara posisi kepemimpinan lebih identik dengan laki-laki. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, muncul tuntutan agar perempuan memiliki akses yang setara dalam berbagai bidang, termasuk dalam posisi kepemimpinan, baik di ruang publik, politik, maupun keagamaan.

Kesetaraan gender bukan semata-mata persoalan persamaan peran, tetapi menyangkut keadilan dalam memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Dalam konteks ini, muncul perdebatan yang cukup kompleks ketika isu kepemimpinan perempuan dibawa ke ranah agama, terutama dalam tradisi Islam dan Katolik. Keduanya merupakan agama samawi yang memiliki warisan ajaran dan tafsir yang panjang mengenai peran gender.

Dalam Islam, terdapat keragaman pandangan ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin, baik dalam konteks politik maupun keagamaan. Sebagian ulama klasik menafsirkan teks-teks agama secara literal dan membatasi peran kepemimpinan perempuan, sementara sebagian ulama kontemporer mencoba membaca ulang teks dengan mempertimbangkan konteks sosial historisnya. Demikian pula dalam tradisi Gereja, khususnya Katolik, posisi kepemimpinan perempuan, seperti menjadi imam atau uskup, masih menjadi

perdebatan teologis yang sangat ketat. Namun di sejumlah denominasi Protestan, perempuan bahkan telah menduduki posisi puncak dalam struktur kepemimpinan gereja.

Perbedaan dan persamaan pandangan ini menunjukkan bahwa agama bukanlah entitas tunggal yang beku, melainkan ruang diskursus yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kedua tradisi agama ini memahami konsep kepemimpinan perempuan, apa dasar teologisnya, bagaimana realitas praktiknya, serta sejauh mana keduanya dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang menuntut inklusivitas dan kesetaraan. Karena pada realitanya masih banyak perdebatan-perdebatan mengenai bagaimana perempuan dalam posisi kepemimpinan dalam doktrin keagamaan. Kajian penelitian ini mencoba melakukan analisis pada posisi kepemimpinan Megawati Soekarno sebagai representasi dari pemimpin perempuan yang beragama Islam dan Aquino bagian dari representasi pemimpin perempuan yang juga beragama Katolik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep kepemimpinan perempuan dalam dua tradisi agama besar, yakni Islam dan Katolik, melalui analisis terhadap teks-teks keagamaan, literatur ilmiah, serta dokumen dokumen historis yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi kitab suci (Al-Qur'an dan Injil), buku-buku referensi keislaman dan kekatolikan, jurnal ilmiah, serta karya-karya tokoh agama dan pemikir kontemporer yang membahas tentang gender dan kepemimpinan. Penelitian ini juga menelaah studi kasus kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Corazon Aquino sebagai representasi implementasi konsep kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial-keagamaan yang patriarkal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengklasifikasi, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang kredibel dan relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode interpretatif, yakni menafsirkan makna teks dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya. Tujuannya adalah untuk memahami konstruksi teologis dan sosiologis terhadap peran serta kepemimpinan perempuan di dalam kedua agama tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kepemimpinan perempuan

Konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam

Perempuan kerap dipersepsikan sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, mudah terbawa perasaan, dan memiliki sifat halus. Sebaliknya, laki-laki sering digambarkan sebagai pribadi yang gagah, berani, rasional, bertanggung jawab, dan memiliki banyak keunggulan lainnya. Pola penggambaran semacam ini menempatkan perempuan seakan-akan sebagai makhluk Tuhan yang selalu membutuhkan perlindungan dan ketergantungan pada laki-laki. Dampaknya, perempuan jarang mendapat kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin karena terpinggirkan oleh dominasi laki-laki yang cenderung bersikap *male chauvinistic*. Namun demikian, perempuan sejatinya dianugerahi oleh Allah SWT dengan karakteristik khas dan sifat-sifat alami yang membedakannya dari laki-laki. Karakteristik tersebut justru dapat menjadi modal penting bagi perempuan dalam menjalankan kepemimpinan, khususnya dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan fitrah dirinya. Adapun sifat-sifat alami perempuan antara lain adalah:

a. Partisipasi

Secara global, jumlah perempuan hampir setara dengan laki-laki, yaitu sekitar 49,7 persen dari total populasi dunia, sehingga perempuan memegang posisi penting dalam struktur demografi internasional (United Nations, 2022). Hal ini menjadikan perempuan sebagai aktor strategis dalam perubahan sosial, ideologi, dan pembangunan di berbagai negara. Salah satu bentuk partisipasi yang semakin diakui secara internasional adalah keterlibatan perempuan dalam proses musyawarah atau deliberasi publik, baik di tingkat lokal maupun global, sebagai bagian dari pengambilan keputusan (Jane Mansbridge, 1999).

b. Memahami kebutuhan sesama perempuan

Perempuan memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga lebih mudah memahami kebutuhan orang lain, khususnya sesama perempuan. Hal ini tidak lepas dari peran besar mereka dalam mengelola aspek-aspek penting kehidupan, mulai dari ekonomi keluarga, pendidikan anak, kesehatan, hingga pengambilan keputusan strategis dalam rumah tangga. Dengan demikian, posisi perempuan tidak hanya sebatas pelengkap, tetapi justru sebagai pengambil keputusan yang signifikan. Oleh karena itu, memahami pola pikir dan cara perempuan dalam menentukan pilihan menjadi hal yang sangat penting, baik dalam ranah keluarga, organisasi, maupun dunia usaha. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, perempuan telah dipercaya untuk memegang peran penting dalam urusan publik, termasuk dalam pengawasan pasar. Umar menunjuk Asy-Syifa' binti Abdullah al-'Adawiyah sebagai pengawas pasar, sebuah jabatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya

transaksi, menegakkan keadilan harga, serta memastikan masyarakat memperoleh haknya secara layak (Islami.co, 2025). Penunjukan ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam ranah ekonomi dan sosial kemasyarakatan, tidak hanya terbatas pada lingkup domestik. Sejarah menunjukkan bahwa sejak masa awal Islam, perempuan telah berperan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup domestik seperti rumah tangga maupun di ruang publik seperti pasar (Suara Aisyiyah, 2025).

c. Berpandangan jauh kedepan

Perempuan pada umumnya memiliki pandangan yang lebih visioner, tidak hanya terkait dengan kehidupan dunia, tetapi juga dalam mempersiapkan kehidupan akhirat. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih antusias dalam mencari dan mengumpulkan informasi dibandingkan laki-laki, sehingga mereka sering memiliki wawasan yang lebih luas dan jauh ke depan. Pandangan jauh ini bahkan dapat melampaui urusan duniawi menuju orientasi ukhrawi. Contohnya dapat dilihat pada istri Raja Fir'aun yang dengan tegas meninggalkan kemewahan istana dan segala kenikmatan dunia demi berpegang pada kebenaran. Sikap visioner tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at Tahriim ayat 11

Sifat-sifat yang telah dipaparkan sebelumnya pada dasarnya mencerminkan potensi diri perempuan yang dapat menjadi kekuatan sekaligus sumber motivasi bagi mereka yang memiliki cita-cita untuk tampil sebagai pemimpin. Tidak ada yang keliru apabila seorang perempuan menanamkan harapan dan tekad untuk memimpin, sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan, Allah SWT menegaskan dalam kitab suci-Nya melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah Ayat 30)

Dari firman tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan bukanlah hak eksklusif satu jenis kelamin, melainkan peluang yang terbuka bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Makna kepemimpinan sendiri sangat luas dan mencakup berbagai ranah. Seorang perempuan, misalnya, dapat berperan sebagai pemimpin dalam pemerintahan, pendidikan, keluarga, bahkan yang paling mendasar menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Justru kemampuan memimpin diri sendiri merupakan bentuk kepemimpinan yang paling esensial dan menentukan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh amanah. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibn Abbas: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Ibn Abbas). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak terdapat satu pun konsep dalam al-Qur'an yang secara khusus melarang perempuan untuk

mengambil peran kepemimpinan. Justru, al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk memimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, ketika membahas persoalan kepemimpinan perempuan, salah satu topik yang kerap menimbulkan perdebatan adalah mengenai kedudukan perempuan sebagai pemimpin dalam kelompok yang didominasi oleh laki-laki.

Isu kepemimpinan perempuan di Indonesia mulai mencuat ke permukaan ketika Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri sebagai presiden. Penolakan yang muncul kala itu bukan terutama karena keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan Megawati, melainkan semata-mata karena faktor gender. Walaupun pada Pemilu 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin Megawati meraih suara terbanyak, kemenangan tersebut tidak serta-merta mengantarkan dirinya ke kursi presiden. Sejumlah ulama tetap bersikeras menolak kemungkinan perempuan menduduki jabatan tertinggi negara, bahkan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan legitimasi kepemimpinan perempuan (Musdah Mulia, 2005).

Bagi kelompok yang menolak kepemimpinan perempuan, alasan utama yang mereka kemukakan merujuk pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki berkedudukan sebagai pelindung bagi perempuan, dan dalam konteks tertentu, posisi mereka ditempatkan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Hal ini karena Allah SWT telah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibanding perempuan, serta kewajiban laki-laki untuk menafkahi dari harta mereka. Ayat tersebut kemudian sering dijadikan landasan munculnya doktrin bahwa kepemimpinan hanya layak diemban oleh laki-laki, sementara perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk memimpin. Pandangan inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat perempuan dalam memperoleh posisi strategis, termasuk di ranah politik. Namun, apabila kita menilik kembali sejarah pada masa Rasulullah SAW, akan terlihat bahwa posisi dan peran perempuan tidak selalu dipersempit dalam bingkai pemahaman tersebut.

Sejarah Islam menegaskan bahwa perempuan pertama yang menerima dan mengimani kebenaran Islam adalah Siti Khadijah ra, istri Rasulullah SAW. Beliaulah yang memberikan keyakinan dan dukungan kepada Rasulullah bahwa beliau benar-benar diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Selain itu, hadir pula sosok perempuan istimewa, Sayyidatuna Aisyah ra. Kecerdasannya dan keluasan ilmunya tumbuh dari kedekatannya dengan Rasulullah SAW, menjadikannya salah satu rujukan penting bagi umat. Dari bimbingan tersebut, beliau berkembang menjadi seorang ahli sastra sekaligus ahli dalam ilmu agama Islam. Banyak sahabat Nabi maupun para Tabi'in yang menimba ilmu langsung

dari Sayyidatuna Aisyah ra. Setelah itu, perhatian Rasulullah SAW juga tercurah kepada putrinya, Fatimah Az-Zahra. Beliau sangat menyayangi Fatimah, dan kasih sayang itu diwujudkan melalui pendidikan yang menjadikan Fatimah sebagai pribadi bermental tangguh meskipun hidup dalam kesederhanaan. Ketiga sosok perempuan tersebut—Siti Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, dan Fatimah Az-Zahra merupakan figur yang sangat dicintai, dihormati, dan disantuni Rasulullah sepanjang hidupnya. Dalam tinjauan sejarah kenabian, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para rasul sebelumnya, tampil sebagai seorang pembaharu dan revolusioner yang menentang berbagai bentuk penindasan, khususnya yang dialami oleh kaum perempuan.

Pada masa jahiliyah, kedudukan perempuan berada pada titik yang sangat rendah. Mereka ditempatkan dalam posisi terbelakang dan kerap dijadikan objek perlakuan sewenang-wenang oleh kaum laki-laki. Hak-hak dasar perempuan diabaikan; mereka tidak memperoleh warisan, bahkan justru diperlakukan sebagai bagian dari harta warisan. Perempuan dianggap hina, tidak bernilai, dipandang tidak sempurna, dan diposisikan sebagai beban keluarga. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib yang harus dihapus dengan cara dibunuh. Akan tetapi, kehadiran Rasulullah SAW membawa perubahan besar. Beliau mengangkat martabat perempuan dengan memberikan penghormatan, kesempatan, serta kebebasan bagi mereka, terutama dalam menuntut ilmu pengetahuan (Muhammad Husain Haekal, 2002).

Konsep kepemimpinan Perempuan dalam Katolik

Dalam Injil, perempuan digambarkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Walaupun peran mereka tidak selalu ditampilkan setara dengan tokoh-tokoh utama lainnya, sosok-sosok seperti Maria, ibu Yesus, dan Maria Magdalena memiliki posisi penting dalam berbagai peristiwa besar yang mewarnai perjalanan serta pelayanan terhadap Yesus. Mereka bukan hanya hadir sebagai saksi, tetapi juga memberikan dukungan penuh dengan kesetiaan dalam setiap langkah pengabdian Yesus (Rebecca Moore, 2015). Injil menjelaskan salah satu peran penting perempuan tercermin melalui sosok Maria yang memperoleh kehormatan agung Sebagai ibu Yesus Kristus, Anak Allah, Maria mengandung berkat campur tangan Roh Kudus. Perannya sebagai ibu Mesias menghadirkan makna rohani yang begitu kuat dalam alur Injil. Maria turut menjadi saksi dalam berbagai peristiwa penting, misalnya pada pernikahan di Kana ketika Yesus melakukan mukjizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur.

Maria Magdalena kerap mendapat perhatian khusus karena perannya yang signifikan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Ia termasuk salah satu perempuan yang setia mendampingi

pelayanan Yesus dan dicatat sebagai saksi utama pada saat kebangkitan-Nya. Kehadiran Maria Magdalena juga mencerminkan makna pengampunan serta transformasi hidup yang lahir dari iman, Sebab, pengalaman pribadinya menunjukkan bagaimana kasih Kristus memulihkannya dan membawanya kepada keselamatan. Injil juga menyingkap keterlibatan sejumlah perempuan lain yang turut berperan dalam pelayanan Yesus. Marta dan Maria, saudari Lazarus, digambarkan sebagai tuan rumah yang menyambut kehadiran Yesus dengan penuh penghormatan.

Yesus menjalin relasi dengan perempuan tidak sebatas pada ranah keluarga, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menerima dan menyampaikan ajaran-Nya. Yesus sering melibatkan perempuan dalam dialog penuh makna sekaligus memberikan pengajaran secara langsung, seperti terlihat dalam percakapan-Nya dengan perempuan Samaria di sumur dan peristiwa perempuan berdosa yang dibawa ke hadapan-Nya.

Peranan perempuan sebagaimana tercatat dalam Injil menegaskan nilai kesetaraan serta kepedulian Yesus terhadap setiap orang, termasuk mereka yang kerap dipandang rendah atau terpinggirkan dalam masyarakat pada masanya. Para perempuan tersebut bukan sekadar saksi, melainkan juga menjadi mitra aktif dalam pelayanan dan penerusan ajaran Yesus. Kehadiran dan kontribusi mereka inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pemahaman dalam tradisi Katolik mengenai martabat manusia dan prinsip kesetaraan gender (Outi Lehtipuu, 2017).

a. Peran perempuan pada Abad-abad pertama kekatolikan

Pada masa-masa awal perkembangan Kekatolikan, Muncul figur-figur perempuan, seperti Perpetua dan Felicitas, yang dikenal sebagai teladan dalam keteguhan iman. Keduanya Mereka berkiprah bukan saja dalam pengajaran dan pelayanan sosial, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan jemaat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perempuan-perempuan Katolik tetap memegang peranan penting dalam memperkuat sekaligus memperluas komunitas gereja. Walaupun kontribusi mereka berbeda-beda sesuai dengan konteks budaya dan geografis, secara umum tercermin gambaran yang konsisten mengenai peran vital perempuan dalam Kekatolikan pada periode awal tersebut

Pada abad-abad awal, perempuan turut mengambil bagian penting sebagai penginjil dan pengajar dalam komunitas Katolik. Peran mereka tidak terbatas pada penghayatan iman secara pribadi, melainkan juga diwujudkan dalam upaya membagikan kabar gembira Injil kepada orang lain. Tokoh-tokoh seperti Perpetua dan Felisitas bahkan dikenang sebagai martir yang menjadi teladan keteguhan iman. Kesetiaan mereka kepada Kristus tidak hanya tercermin dalam keyakinan pribadi, tetapi

juga melalui kesaksian hidup yang memberikan pengaruh mendalam bagi orang-orang di sekitarnya.

Terdapat pula bukti historis yang menunjukkan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin jemaat di berbagai wilayah pada masa awal Kekristenan. Misalnya, Rufina tercatat sebagai kepala sinagoga di Smyrna, sementara Sophia dari Gortyn memimpin sinagoga di Kisamos, Kreta. Di Mesir, terdapat Paniskianes yang dikenal sebagai imam perempuan, sedangkan Ammion juga seorang imam perempuan (*presbytera*) mendapat penghormatan khusus dari Uskup Diogenes. Selain itu, di Sisilia ditemukan nama Kale yang juga berperan sebagai imam perempuan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam struktur keagamaan pada masa tersebut (Pamela Walford, 2023). Terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan bahwa seorang perempuan pernah diangkat dengan jabatan uskup. Sosok tersebut adalah Theodora, yang diberi gelar *episcopa* bentuk feminin dari *episcopus* yang berarti uskup. Fakta ini memberikan gambaran bahwa peran kepemimpinan perempuan dalam struktur gereja pada masa-masa tertentu jauh lebih signifikan daripada yang kerap diasumsikan (Eunha Kim, 2023). Hingga kini, jejak penghormatan terhadap Theodora masih dapat ditemukan di Basilika St. Praxedis, Roma. Selain itu, catatan sejarah juga menyebutkan keberadaan seorang imam perempuan di Pulau Thera, Yunani, bernama Epiktas yang menyandang gelar *presbytis* (dari kata *presbyter* yang berarti imam). Fakta-fakta tersebut semakin menegaskan bahwa perempuan pada masa-masa tertentu memiliki posisi dan pengakuan resmi dalam struktur keimaman gereja (Torjesen, n.d.).

Perempuan Katolik juga berperan aktif dalam bidang pelayanan sosial dengan memberikan bantuan kepada kaum miskin, yatim piatu, serta mereka yang membutuhkan pertolongan. Di sejumlah wilayah, para janda dan perawan Katolik membentuk kelompok amal yang berfungsi mendukung kebutuhan sosial maupun keuangan bagi sesama anggota Gereja. Beberapa di antara mereka bahkan diangkat sebagai diakon perempuan (*diakones*). Dalam dokumen pengelolaan Gereja abad ke-2 yang dikenal sebagai *Teaching/Statutes of the Apostles*, disebutkan bahwa tiga janda ditahbiskan dengan mandat khusus, yaitu mengemban kerasulan doa serta menerima pewahyuan (Torjesen, n.d.). Selain itu, ada diakones yang diutus khusus untuk memberikan pelayanan kepada kaum perempuan, terutama dalam urusan yang tidak memungkinkan dilakukan oleh laki-laki (Jean Daniélou, 1961).

Dalam tradisi Gereja Bizantium, sejumlah perempuan juga ditahbiskan sebagai diakon. Namun, lingkup pelayanan mereka berbeda dengan diakon laki-laki. Para

diakon perempuan lebih banyak menjalankan pelayanan dalam ranah privat, sedangkan diakon laki-laki berperan di ruang publik. Meskipun terdapat perbedaan tugas, keduanya dapat dipandang setara dari sisi jenjang klerikal. Perbedaannya terletak pada batasan jenjang berikutnya: diakon perempuan tidak memiliki kemungkinan untuk ditahbiskan sebagai imam atau uskup, sementara diakon laki-laki berpeluang melanjutkan ke tahapan tersebut (Valerie A. Karras, 2004). Seiring dengan berkembangnya tradisi monastisisme, banyak perempuan memilih jalan hidup sebagai biarawati atau anggota komunitas religius. Pilihan ini didasarkan pada kerinduan untuk mengabdikan diri dalam pelayanan, doa, serta pertumbuhan rohaniah. Keberadaan biara-biara perempuan, baik di Kepulauan Britania maupun di daratan Eropa, menjadi wadah bagi mereka untuk menekuni kehidupan spiritual sekaligus melaksanakan pelayanan dalam komunitas. Salah satu tokoh penting dalam gerakan monastik perempuan adalah St. Bridget dari Irlandia, yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Gereja melalui kepemimpinan dan pengaruh spiritualnya (Paul Maxwell, 2020).

Pada sejarah Gereja awal, sejumlah perempuan tercatat memiliki pengaruh yang cukup besar. Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, misalnya, dikenal karena dukungannya terhadap perkembangan Kekatolikan serta legenda penemuan Salib Yesus di Yerusalem yang dikaitkan dengan dirinya. Sosok lain adalah Tekla, yang dianggap murid Paulus dan dikenal akan keberaniannya dalamewartakan Injil. Meskipun kisahnya terutama tercatat dalam kitab apokrif *Kisah Paulus dan Tekla*, ia tetap dipandang sebagai figur penting, bahkan sering disebut sebagai salah satu filsuf perempuan terkemuka di tengah dominasi filsuf laki-laki pada masa awal Kekristenan. Selain itu, sejumlah perempuan kaya atau bangsawan juga berperan sebagai patron Gereja dengan memberikan dukungan finansial untuk pembangunan gereja, membantu para penginjil, dan mendukung penyebaran ajaran Kekatolikan. Kendati banyak perempuan yang aktif dalam berbagai bentuk pengabdian, partisipasi mereka tetap dibatasi, khususnya dalam pelayanan liturgis dan jabatan gerejawi tertentu, yang sebagian besar dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya pada waktu itu.

Pada abad-abad awal Kekatolikan, perempuan tetap memegang peranan yang penting dalam kehidupan Gereja, meskipun mulai muncul berbagai upaya untuk membatasi keterlibatan mereka. Mereka aktif dalam karya-karya amal, seperti merawat orang sakit dan membantu kaum miskin, serta tidak sedikit yang akhirnya menjadi martir karena mempertahankan iman. Namun, seiring dengan semakin terlembaganya

struktur Gereja, ruang gerak perempuan kian dipersempit, khususnya dengan dikecualikannya mereka dari posisi-posisi kepemimpinan. Kendati demikian, kontribusi perempuan dalam berbagai bidang tetap menjadi faktor sentral bagi pertumbuhan dan perkembangan Kekatolikan pada masa-masa awal. Walaupun disertai dengan batasan dan variasi sesuai konteks sosial-budaya, keterlibatan mereka memperkaya keberagaman sekaligus dinamika gereja-gereja perdana.

Megawati Dan Aquino Menjalankan Kepemimpinan Mereka Di Tengah Konstruksi Sosial-Keagamaan

Gender, Agama, dan Politik

Pada konteks masyarakat Asia Tenggara, dinamika antara gender, agama, dan politik membentuk suatu yang kompleks dan sarat dengan ketegangan historis. Kawasan ini, meskipun memiliki keragaman budaya dan keyakinan agama, tetap memiliki satu benang merah yaitu kuatnya pengaruh sistem patriarki dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sering kali dibalut oleh tafsir keagamaan konservatif telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama dalam ranah publik dan kepemimpinan.

Dalam banyak komunitas, kehadiran perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan bertentangan dengan norma religius. Ajaran agama kerap dijadikan pembenaran untuk mempertahankan status quo gender, melalui interpretasi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengikut. Dalam konteks ini, konstruksi sosial-keagamaan bukan hanya membentuk identitas perempuan, tetapi juga menentukan batas-batas peran yang dianggap sah bagi mereka.

Namun, sejarah politik Asia Tenggara mencatat beberapa momen penting di mana batas-batas tersebut berhasil ditembus. Dua figur sentral yang patut disoroti dalam konteks ini adalah Megawati Soekarnoputri di Indonesia dan Corazon Aquino di Filipina. Kedua tokoh ini tidak hanya menantang struktur kekuasaan yang maskulin, tetapi juga menegosiasikan identitas mereka sebagai perempuan di tengah ekspektasi religius dan budaya yang sering kali membatasi.

Kepemimpinan mereka bukan hanya sebuah kemenangan elektoral atau peristiwa politik semata. Kehadiran mereka sebagai pemimpin perempuan dalam struktur negara menjadi simbol dari transformasi sosial yang lebih dalam resistensi terhadap sistem nilai patriarkal yang telah lama mengakar, serta reinterpretasi atas makna kepemimpinan dalam konteks keagamaan. Megawati dan Aquino masing-masing muncul di tengah masyarakat yang sangat religious, Indonesia dengan mayoritas Muslim dan Filipina sebagai negara Katolik terbesar di Asia sehingga tindakan dan legitimasi mereka sebagai pemimpin tidak lepas dari lensa tafsir agama.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menelaah bagaimana kepemimpinan Megawati dan Aquino tidak hanya merepresentasikan perubahan dalam struktur politik, tetapi juga menjadi medan perlawanan simbolik terhadap wacana-wacana dominan tentang gender dan agama. Kepemimpinan mereka membuka ruang bagi munculnya diskursus baru tentang posisi perempuan dalam kekuasaan, serta memperlihatkan bahwa otoritas tidak hanya bisa dibangun melalui kekuatan, tetapi juga melalui moralitas, kesabaran, dan kebijaksanaan yang bersifat keibuan. Maka, memahami pengalaman politik dua tokoh ini tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk melihat bagaimana gender dan agama saling bertautan dalam kekuasaan di Asia Tenggara.

Megawati dengan beberapa tantangan penolakan partai politik Islam

Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 (2001–2004) merupakan salah satu titik penting dalam sejarah politik modern Indonesia. Di tengah gelombang reformasi yang masih mencari bentuk, kemunculan Megawati bukan hanya memantik dinamika politik, tetapi juga memunculkan kembali perdebatan lama seputar legitimasi perempuan dalam posisi kekuasaan public, terutama dalam bingkai keagamaan. Penolakannya sebagai pemimpin, terutama dari kalangan ulama konservatif, memperlihatkan betapa dalamnya konstruksi sosial dan teologis yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam politik dan perempuan sebagai pendukung semata.

Meski PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999, Megawati tidak otomatis memperoleh kursi presiden. Resistensi terhadapnya bukan terletak pada kredensial politik atau kemampuannya, melainkan pada fakta biologis ia adalah seorang perempuan. Salah satu rujukan utama dalam menolak kepemimpinannya adalah QS. An-Nisa ayat 34, yang menyebut bahwa "laki-laki adalah qawwam (pemimpin/pelindung) bagi perempuan", dan oleh sebagian kalangan ditafsirkan sebagai larangan eksplisit bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan publik.

Namun dalam menghadapi tekanan tersebut, Megawati memilih jalur yang tidak konfrontatif. Ia tidak mengajukan narasi tandingan atas tafsir agama yang patriarkis, tidak pula memosisikan dirinya sebagai pejuang feminis yang frontal terhadap dominasi laki-laki dalam diskursus agama. Sebaliknya, Megawati mengedepankan gaya kepemimpinan yang tenang, konsisten, dan simbolik merupakan sebuah pendekatan yang merefleksikan kekuatan feminin dalam ruang politik yang selama ini didominasi nilai-nilai maskulin.

Dalam berbagai kesempatan, Megawati tampil sebagai figur "ibu bangsa" sosok yang tidak hanya memimpin, tetapi juga mengayomi. Ia memanfaatkan warisan simbolik dari sang ayah yaitu Ir. Soekarno, untuk membangun legitimasi yang kuat di tengah keraguan publik.

Namun yang menarik, Megawati tidak menjadikan warisan itu sebagai alat kultus personal. Ia tidak mengejar popularitas retorik seperti ayahnya, melainkan mengadopsi pendekatan lebih senyap namun strategis. Dalam kondisi politik pasca-reformasi yang masih goyah, ia berfokus menjaga kestabilan negara.

Di tengah tekanan sosial-keagamaan yang begitu kental, Megawati tidak terjebak dalam debat teologis yang bisa memecah belah masyarakat, terutama antara kalangan nasionalis dan kelompok Islam. Ia dengan sengaja menjaga jarak dari politisasi agama, dan memilih membiarkan wacana keagamaan berkembang secara alami di masyarakat sipil. Strategi ini mencerminkan kepriwajaan Megawati dalam memainkan peran simbolik sebagai pemimpin nasional yang netral secara religius ia tidak antireligius, tetapi juga tidak menjadikan agama sebagai alat politik.

Sikap ini bukan tanpa risiko. Megawati kerap dianggap kurang komunikatif dan dingin secara politik. Namun di balik itu, ia menegaskan bahwa kekuasaan bukan semata-mata soal tampil dominan, tetapi soal kemampuan bertahan, menjaga stabilitas, dan tidak terprovokasi oleh tekanan wacana ideologis yang bisa memecah belah bangsa. Lebih dari sekadar tokoh politik, Megawati mewakili tipe pemimpin perempuan yang tidak berusaha menjadi “laki-laki” untuk membuktikan kemampuannya. Ia tetap dengan karakternya yang tegas namun bersahaja, dan justru melalui pendekatan itu, ia berhasil mematahkan asumsi bahwa hanya karakter maskulin yang mampu mengelola kekuasaan.

Dengan segala keterbatasan, warisan Megawati dalam sejarah kepemimpinan Indonesia adalah keberaniannya untuk tetap teguh berdiri di tengah badai keraguan. Ia tidak memaksa perubahan wacana keagamaan, tetapi kehadirannya sendiri sebagai pemimpin perempuan sudah merupakan bentuk paling konkret dari pergeseran paradigma sosial-keagamaan di Indonesia. Kepemimpinannya menjadi simbol bahwa tafsir agama tidak bersifat tunggal, dan bahwa perempuan pun mampu memimpin tidak hanya karena diberi ruang, tetapi karena mereka memang memiliki kapasitas yang layak diperhitungkan.

Corazon Aquino dalam Kepemimpinan Moral dan Bayangan Katolik

Corazon “Cory” Aquino merupakan ikon demokrasi Filipina dan simbol kebangkitan rakyat terhadap tirani. Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Filipina (1986–1992), Aquino menorehkan sejarah bukan hanya karena ia berhasil menggulingkan rezim otoriter Ferdinand Marcos melalui gerakan revolusioner tanpa kekerasan People Power, tetapi juga karena ia menghadirkan wajah baru kepemimpinan: lembut namun tegas, religius namun rasional, perempuan namun kuat.

Lahir dan dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat, nilai-nilai keagamaan telah menjadi fondasi moral dalam kehidupan pribadi dan publik Aquino. Kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh spiritualitas Katolik yang mendalam. Dalam sebuah bangsa di mana agama Katolik bukan hanya sistem kepercayaan tetapi juga bagian dari identitas nasional, Aquino menjadikan agama bukan sekadar simbol, tetapi instrumen pembentukan etika politik yang bersih dan melayani.

Berbeda dengan Megawati yang bersikap netral terhadap agama, Aquino secara terbuka menjadikan iman Katolik sebagai sumber legitimasi kekuasaannya. Ia kerap terlihat mengikuti misa, memimpin doa dalam pertemuan politik, serta menyampaikan pesan-pesan kenegaraan dengan retorika yang dipenuhi nilai-nilai Kristiani seperti pengorbanan, kesetiaan, kasih, dan pengampunan. Ia tidak berupaya menjadi pemimpin dalam pengertian konvensional yang penuh otoritas dan dominasi. Sebaliknya, ia mengukuhkan dirinya sebagai seorang istri yang kehilangan suami, seorang ibu bangsa yang tulus, dan seorang warga yang dipanggil untuk melayani bangsanya dengan kerendahan hati.

Narasi sebagai “janda berduka” dari tokoh oposisi Benigno "Ninoy" Aquino Jr, yang dibunuh pada 1983 saat kembali dari pengasingan untuk melawan rezim Marcos, memberikan kekuatan moral yang besar pada Cory. Ia menjelma menjadi figur simbolik yang bukan hanya sekadar pemimpin politik, tetapi juga perwujudan nilai-nilai Katolik yang mendorong transformasi sosial secara damai. Dalam perspektif teologi Katolik, Aquino sering dipersepsikan sebagai "Maria kontemporer" Perempuan penuh penderitaan, namun tetap setia dan kuat dalam menghadapi sistem yang korup dan represif. Pengalaman personalnya dijadikan kekuatan spiritual dan politik untuk membangun kepercayaan rakyat.

Namun tentu saja, seperti Megawati, Aquino juga menghadapi tantangan gender yang signifikan. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk memimpin negara yang sedang dilanda krisis. Di tengah keraguan itu, Aquino tidak membalas dengan agresi atau pembuktian kekuasaan, melainkan membuktikan dirinya melalui praktik servant leadership sebuah konsep kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan, bukan dominasi. Ia melihat kekuasaan bukan sebagai alat untuk mengendalikan, tetapi sebagai sarana untuk mengabdikan. Sikap ini tampak nyata dalam kebijakannya yang menolak segala bentuk otoritarianisme, termasuk godaan untuk menjadi “diktator baru” setelah berhasil menggulingkan Marcos.

Aquino dengan tegas memulihkan institusi demokrasi yang hancur di era Marcos. Ia mencabut undang-undang darurat militer, menyusun kembali konstitusi yang menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, kepemimpinannya tidak hanya berfungsi sebagai transisi politik, tetapi juga sebagai jembatan antara masa lalu yang traumatik dan masa depan yang demokratis.

Kekuatan Aquino tidak datang dari retorika militeristik atau strategi kekuasaan konvensional. Ia tidak memiliki pengalaman politik yang panjang atau jaringan elit yang kuat. Justru dari posisi “luar” itulah ia tampil sebagai simbol harapan baru bahwa pemimpin tidak harus berkuasa dengan tangan besi, tetapi bisa hadir sebagai suara nurani rakyat. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa kekuatan perempuan bukan berada pada peniruan sifat maskulin, tetapi pada otentisitas karakter yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan dan religius yang mendalam.

Cory Aquino membuktikan bahwa politik tidak harus mengorbankan moralitas, dan bahwa agama bukan penghalang bagi kepemimpinan perempuan, melainkan justru bisa menjadi daya dorong transformatif bagi politik yang manusiawi dan inklusif. Ia menjadi teladan bahwa perempuan, bahkan dari posisi yang dianggap lemah, bisa mengubah Sejarah dengan cara yang lembut, penuh cinta, dan bermartabat.

Tafsir agama tentang kepemimpinan Perempuan

Kisah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Corazon Aquino bukan sekadar catatan sejarah politik, tetapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana perempuan menavigasi kekuasaan dalam ruang yang selama ini dibatasi oleh tafsir agama dan norma sosial patriarkal. Di tengah sistem sosial-keagamaan yang kerap menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya figur yang sah dalam ranah kepemimpinan publik, kehadiran mereka menjadi penanda penting bahwa perempuan pun memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa, bahkan dalam kondisi krisis yang menuntut keteguhan, kebijaksanaan, dan visi moral.

Keduanya tidak sekadar "menyesuaikan diri" dengan struktur yang telah ada, melainkan secara perlahan dan strategis menggeser paradigma dominan. Tanpa harus melakukan konfrontasi langsung terhadap otoritas keagamaan atau nilai-nilai konservatif, baik Megawati maupun Aquino membuktikan bahwa perempuan dapat memimpin dengan cara mereka sendiri bukan dengan meniru gaya maskulin yang otoritatif, tetapi dengan menghadirkan model kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai kesabaran, pengabdian, spiritualitas, dan simbolisme moral.

Dalam konteks ini, legitimasi kepemimpinan mereka dibangun tidak melalui dominasi politik atau manuver kekuasaan semata, melainkan melalui fondasi yang lebih dalam: koneksi emosional dengan rakyat, warisan sejarah keluarga, nilai-nilai agama yang humanis, serta keteladanan pribadi. Aquino tampil sebagai figur keibuan religius yang menyembuhkan luka kolektif bangsa dengan kasih dan iman, sementara Megawati memancarkan keteguhan yang

senyap, namun kuat dalam menjaga stabilitas negara tanpa mengeksploitasi simbol-simbol agama atau gender.

Aspek lebih penting, kepemimpinan mereka membuka jalan bagi hadirnya wacana baru mengenai relasi antara agama, gender, dan kekuasaan. Mereka membuktikan bahwa tafsir agama bukanlah sesuatu yang kaku dan mutlak, tetapi terbuka untuk dialog dan reinterpretasi, terutama ketika dihadapkan dengan realitas sosial yang terus berubah. Dalam ruang itulah, perempuan dapat merebut ruang kepemimpinan tanpa harus meniadakan identitasnya sebagai perempuan yang religius dan bermoral.

Megawati dan Aquino adalah pionir dalam membongkar mitos bahwa kekuasaan hanya milik laki-laki, dan bahwa agama selalu menjadi hambatan bagi emansipasi perempuan. Kepemimpinan mereka memberikan inspirasi bagi generasi perempuan selanjutnya untuk berani tampil di ruang publik, bukan sebagai pengekor, tetapi sebagai aktor utama perubahan sosial dan politik. Mereka menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tidak selalu berarti bersuara paling lantang atau bertindak paling keras, tetapi juga berarti memiliki ketangguhan moral, integritas pribadi, dan ketulusan untuk melayani. Dengan segala tantangan dan keterbatasannya, keduanya telah mewariskan bukan hanya narasi kepemimpinan perempuan, tetapi juga model baru tentang kepemimpinan yang beretika, spiritual, dan inklusif. Di tengah dunia yang masih terus bergulat dengan ketimpangan gender dan polarisasi agama, pengalaman Megawati dan Aquino tetap relevan sebagai pelajaran berharga bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah simbolik, lembut, namun bermakna.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam dan Katolik tidak semata-mata dipengaruhi oleh tafsir teologis, tetapi juga oleh strategi sosial-politik yang dijalankan pemimpin perempuan di tengah budaya patriarkal. Temuan baru dari penelitian ini adalah bahwa legitimasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Corazon Aquino tidak dibangun melalui konfrontasi terhadap tafsir keagamaan konservatif, melainkan melalui model kepemimpinan yang khas dan kontekstual, Megawati dengan keteguhan serta netralitas terhadap politisasi agama, sementara Aquino dengan kepemimpinan moral yang berakar pada spiritualitas Katolik.

Hasil ini berbeda dari banyak penelitian normatif sebelumnya yang cenderung menegaskan bahwa secara teologis dan hukum agama, perempuan dibatasi peran kepemimpinannya, dan bahwa larangan atau pembatasan tersebut memiliki dasar normatif yang kuat. Sebagai contoh, penelitian normatif oleh Gunawan Abdi yang menunjukkan

bahwa dalam perspektif hukum Islam terdapat perbedaan interpretasi mengenai kepemimpinan perempuan, tetapi hukum positif di Indonesia memberikan jaminan penuh atas hak perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan (Gunawan Abdi, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperluas wawasan normatif tersebut dengan menyajikan bukti empiris bahwa perempuan yang menjadi pemimpin seperti Megawati dan Aquino, tidak hanya mampu memanfaatkan resonansi normatif teologis, tetapi juga memanifestasikan praktik kepemimpinan alternatif yang etis, spiritual, dan inklusif yang justru membongkar dominasi maskulin dalam ranah publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya sah secara teologis menurut norma-norma Islam dan Katolik, tetapi juga mampu merekonstruksi ruang politik dan sosial di mana agama dan gender diperlakukan secara interaktif dan adaptif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, G. (2023). Women's leadership and the law of choosing women leaders in the perspective of Islamic law and positive law. *Jurnal Ilmiah, Institut Nahdlatul Ulama Sumatera Utara*.
- Daniélou, J. (1961). The ministry of women in the early church. *La Maison-Dieu*, 61, 21.
- Fitriani, A. (2015). Gaya kepemimpinan perempuan. *Jurnal TAPIs*, 11(2), 1–24.
- Gibson, J. L. (2005). *Organisasi, perilaku, struktur dan proses* (5th ed., 3rd printing). Erlangga.
- Haekal, M. H. (2002). *Sejarah hidup Muhammad*. Litera AntarNusa.
- Islami.co. (2025, September 24). Syifa' binti Abdullah al-'Adawiyah, perempuan penjaga pasar pada masa Umar bin Khattab. *Islami.co*. <https://islami.co/syifa-binti-abdullah-al-adawiyah-penjaga-pasar-perempuan-pada-masa-umar-bin-khattab/>
- Karras, V. A. (2004). Female deacons in the Byzantine church. *Church History*, 73(2), 315–316. <https://doi.org/10.1017/S000964070010928X>
- Kim, E. (2023). The growth, decline, and transformation of the diaconal ministry and the role of women deaconesses in the early churches. *Religions*, 14(11), 2–3. <https://doi.org/10.3390/rel14111415>
- Lehtipuu, O., & Dunderberg, I. (2017). Women and knowledge in early Christianity: An introduction. In U. Tervahauta, et al. (Eds.), *Women and knowledge in early Christianity* (Supplements to Vigiliae Christianae, Vol. 144, pp. 8–10). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004344938_002
- Mansbridge, J. (1999). Deliberative democracy or democratic deliberation? In S. Macedo (Ed.), *Deliberative politics: Essays on democracy and disagreement* (pp. 259–266). Oxford University Press.
- Maxwell, P. (2020, June 17). 17 great women of the Bible every Christian must know. *get.tithe.ly Blog*. <https://get.tithe.ly/blog/women-of-the-bible>

- Mufarikhin, & Dewi, S. M. (2021). Kepemimpinan perempuan Muslim dalam diskursus pemikiran kontemporer. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.21043/politea.v3i2.8844>
- Mulia, M. (2005). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*. Mizan.
- Suara Aisyiyah. (2024, September 14). Asy-Syifa binti Abdillah: Pengawas pasar perempuan. *Suara Aisyiyah*. <https://suaraaisyiyah.id/asy-syifa-binti-abdillah-pengawas-pasar-perempuan/>
- Torjesen, K. J. (1993). *When women were priests: Women's leadership in the early church and the scandal of their subordination in the rise of Christianity*. HarperSanFrancisco.
- Walford, P. (2023, July 29). The story of God: Women in the early church. *The "New" Church of God Messenger*, 3.